

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**

TAHUN 2018



***DINAS KEPENDUDUKANDAN
PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR***
Jalan Majapahit Nomor 1 Denpasar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Isu Strategis.....	4
1.4 Struktur Organisasi.....	4
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis	8
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	8
2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan	10
2.1.3 Program dan Kegiatan	10
2.2 Perjanjian Kinerja.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	15
3.2 Pengukuran Kinerja.....	16
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	16
3.3.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	16
3.3.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	19
3.3.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	12
3.3.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional	14
3.3.5. Prosentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga.....	15
3.3.6. Prosentase penduduk yang memiliki KTP-El.....	17
3.3.7. Prosentase kepemilikan Akta Kelahiran.....	19
3.3.8. Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi Akta Kematian..	21
3.3.9. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	24

3.3.10. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	27
3.4. Realisasi Anggaran.....	28
BAB IV PENUTUP	45
LAMPIRAN	



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkat karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2018, dimana Laporan ini disusun untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang telah dicapai pada tahun tersebut dan sebagai Perwujudan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai instansi yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, khususnya dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Diharapkan agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) dapat dijadikan alat ukur dari kinerja yang telah dicapai sebagai bahan evaluasi serta pengambilan kebijakan yang akan diterapkan pada tahun berikutnya.

Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan pada penyusunan Laporan ini, untuk itu kami mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun bagi kesempurnaan laporan ini. Sekian dan terimakasih.

Denpasar, 14 Pebruari 2019
PLt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Denpasar



Ir. Anak Agung Istri Agung MM

Pembina Tk. I

NIP.19610707 198703 2 010



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab membangun pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan prima. Tertibnya administrasi kependudukan akan mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap dan akurat dalam rangka memenuhi pelayanan publik yang prima untuk kepentingan pembangunan. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dalam pelayanan dan mekanisme untuk mendokumentasikan atau mengadministrasikan Dokumen Kependudukan saat ini telah diberlakukan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan dengan program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan di dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 33 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Perda Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan



yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2017 dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar
- b. Instruksi Menteri Nomor 77 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara
- e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
- g. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021.



1.3. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses akan terjadi tentang kependudukan. Permasalahan mendesak terkait dengan kependudukan Kota Denpasar yang ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tidak terlepas dari isu-isu pembangunan pada pemerintah Kota Denpasar. Berdasarkan isu-isu pembangunan Kota Denpasar maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawab membantu Walikota Denpasar di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dapat diidentifikasi Isu Strategis sebagai berikut :

- a. Tingginya pertumbuhan penduduk di kota Denpasar diantaranya adalah karena imigrasi penduduk.
- b. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan akta kelahiran.
- c. Masih adanya masyarakat yang belum sepenuhnya sadar serta memahami mengenai manfaat dan pentingnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- d. Semakin tingginya usia harapan hidup yang berarti semakin banyaknya penduduk lanjut usia yang memerlukan perhatian dan pelayanan pembangunan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia.
- e. Berdasarkan kecenderungan sepuluh tahun terakhir, maka dimasa 5-10 tahun mendatang, proporsi penduduk umur muda meningkat pesat.

Hal ini dapat menjadi beban pembangunan bahkan bila kecenderungan tersebut tidak dapat dikendalikan, dikhawatirkan jumlahnya akan terus meningkat sehingga tidak dapat ditopang oleh daya dukung lingkungan.

1.4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan
 - b. Kepala Sub bagian Keuangan

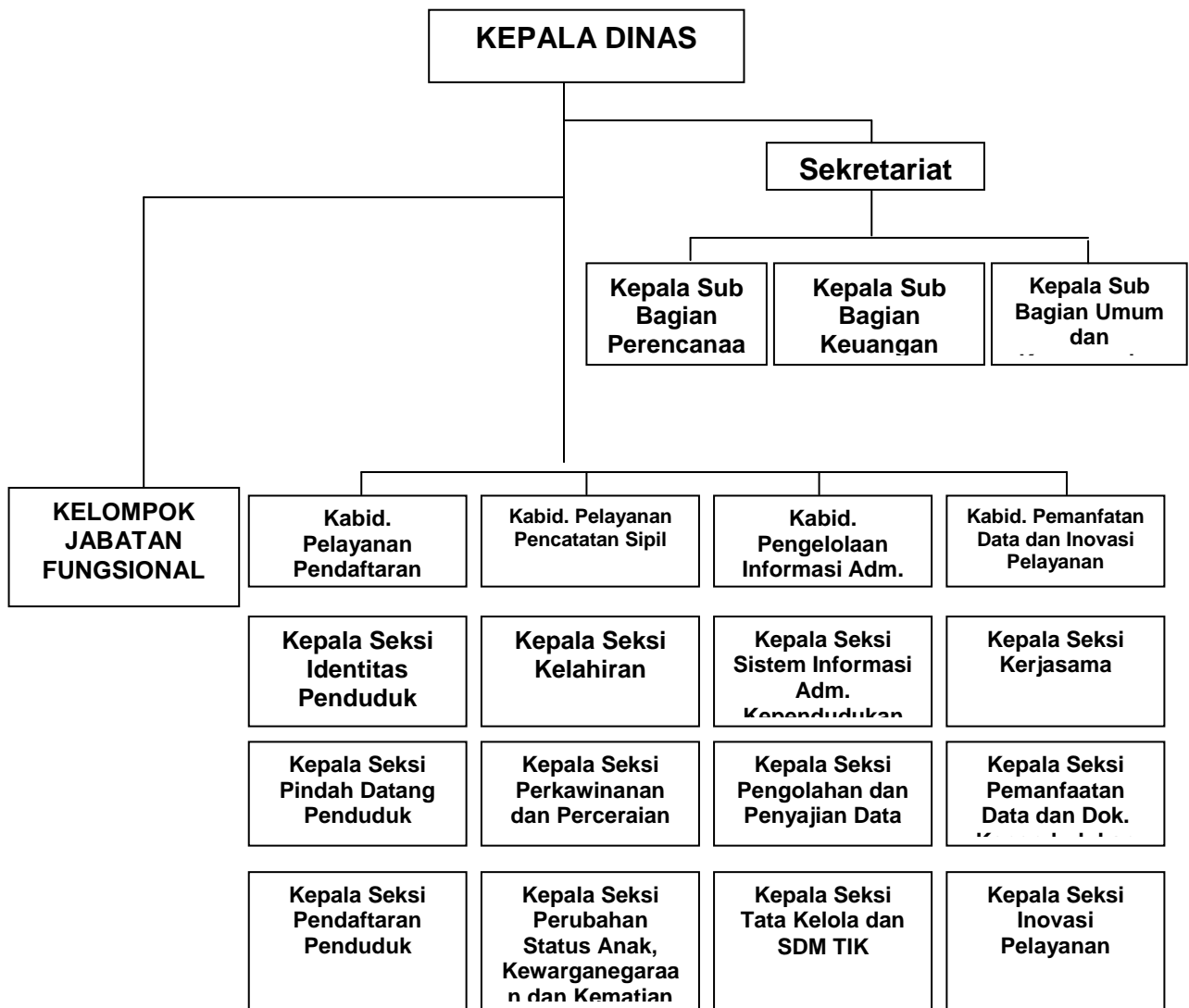


- c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Ka. Bid Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - a. Kepala Seksi Identitas Penduduk
 - b. Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk
 - c. Kepala Seksi Pendataan Penduduk
- 4. Ka. Bid Pelayanan Pencatatan Sipil
 - a. Kepala Seksi Kelahiran
 - b. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian
 - c. Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian
- 5. Ka. Bid Pengelolaan Informasi Adm. Kependudukan
 - a. Kepala Seksi Sistem Informasi Adm. Kependudukan
 - b. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
 - c. Kepala Seksi Tata Kelola dan SDM TIK
- 6. Ka. Bid. Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
 - a. Kepala Seksi Kerjasama
 - b. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dok. Kependudukan
 - c. Kepala Seksi Inovasi Pelayanan

Adapun bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :



Gambar 1.4
Bagan Struktur Organisasi





1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Isu Strategis
- 1.4. Struktur Organisasi
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

- 3.1. Capaian Kinerja
- 3.2. Pengukuran Kinerja
- 3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- 3.4. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan rangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan demikian Rencana Strategis disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah kota Denpasar, seperti diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Secara singkat disampaikan Visi dan Misi Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar tahun 2016-2021 adalah **“Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan”** penjabaran lebih konkret visi pembangunan dimaksud Misi Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Memperkuat jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kebudayaan Bali.
2. Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kearifan Lokal.
3. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) berdasarkan Penegakan Supremasi Hukum (Law Enforcement)
4. Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Kota Denpasar Dengan Bertumpu pada Ekonomi Kerakyatan
5. Penguatan Keseimbangan Pembangunan pada berbagai dimensi dan Skalanya berdasarkan Tri Hita Karana

Mengacu pada Visi Pembangunan dimaksud, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menetapkan Tujuan dan Sasaran sebagai upaya untuk mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah Kota Denpasar.



2.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
						2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan tertib administrasi kependudukan di kota Denpasar	1. Prosentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan pencatatan sipil	100 %	1. Terwujudnya tertib Administrasi kependudukan diseluruh kota Denpasar yang tertib dan terpadu	1. Prosentase keluarga yang memiliki kartu keluarga 2. Prosentase penduduk yang memiliki E-KTP 3. Prosentase kepemilikan akta Kelahiran 4. Prosentase penduduk yang meninggal yang dilengkapi dengan Akta Kematian	100 100 90 70	100 100 90 70	100 100 90 70	100 100 90 70	100 100 90 70
2	Meningkatkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	2. Prosentase ketepatan waktu dalam penerbitan administrasi kependudukan	80	2. Meningkatnya kepuasan masyarakat	1. Prosentase hasil survei kepuasan masyarakat	80	81	82	83	84



2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran diatas tentunya dibutuhkan sebuah strategi yang harus diterapkan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerapkan strategi sebagai berikut :

1. Membenahi sistem manajemen pemerintahan menuju sistem yang transparan, responsif, efisien dan efektif.
2. Meningkatkan penanganan dan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan melibatkan Desa/Banjar dan Lembaga Adat.

2.1.3 Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2016-2021. Adapun Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

- a. Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

- a. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
- b. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil
- c. Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil
- d. Sosialisasi kependudukan dan pencatatan sipil
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan



- f. Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendetang
- g. Pembuatan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan
- h. Pelaksanaan E-KTP di Kota Denpasar
- i. Pengolahan dan pengarsipan Data Catatan Sipil
- j. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu
- k. Inovasi Pelayanan Publik
- l. Sertifikasi Iso 9001:2015

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi, disamping itu juga merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*Budgeting Process*) selesai dan disepakati antara pengembalian tugas dengan atasan (*Performance Agreement*).

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

- Meningkatkan Integritas, Akuntabilitas, Transparansi, dan kinerja Aparatur
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya.
- Sebagai alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah
- Untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*)/sanksi (*punishment*).

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar telah mendistribusikan tugas sampai tataran eselon IV yang dapat dilihat pada formulir cascading dan formulir perjanjian kinerja (terlampir).



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dan menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilaporkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian Indikator Kinerja Utama diharapkan secara proporsional dapat memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya.

Indikator Kinerja Utama menggambarkan *outcome* dari program-program utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar yang merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan dan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama senantiasa di *review* seiring dengan dinamika yang berkembang di masyarakat sehingga tujuan Organisasi dapat dicapai secara maksimal.

Indikator Kineja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel 3.1. di bawah ini :



PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Majapahit Telp . 428597 Denpasar
Website : kependudukan.denpasarkota.go.id
Email : kependudukan@denpasarkota.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR

Untuk mengukur pencapaian atas tujuan dan sasaran strategis tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah **Indeks Kepuasan Masyarakat**, sebagai berikut :

1. Prosentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga
2. Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk
3. Prosentase kepemilikan Akta Kelahiran
4. Prosentase penduduk yang meninggal yang dilengkapi dengan Akta Kematian
5. Prosentase hasil survey kepuasan masyarakat

Menyetujui :

Wakil Kota Denpasar



I.B. Dharmawijaya Mantra, SE. M.Si.

Denpasar, 14 Pebruari 2019

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Denpasar



Ir. Anak Agung Istri Agung, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19610707 198703 2 010



TABEL 3.1.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KOTA : DENPASAR

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR

TUGAS DAN FUNGSI : MELAKSANAKAN KEWENANGAN OTONOMI DAERAH KOTA DENPASAR DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No.	SASARAN RPJM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan di seluruh Kota Denpasar yang tertib dan terpadu	1. Prosentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga 2. Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk 3. Prosentase kepemilikan Akta Kelahiran	1. Kepala Bidang Pendaftaran penduduk 2. Kepala Bidang Pencatatan Sipil	Buku Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	$\frac{\text{Jumlah KK yang diterbitkan pada tahun (X)}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga dalam satu wilayah pada tahun (X)}} \times 100 \%$ $\frac{\text{Jumlah KTP Elektronik yang diterbitkan pada tahun (X)}}{\text{Jumlah Wajib KTP Elektronik pada tahun (X)}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan (X)}}{\text{Jumlah Kelahiran yang terjadi}} \times 100\%$

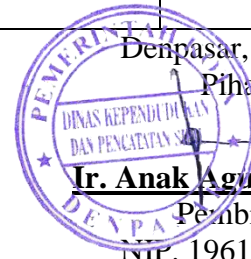


2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	<p>4. Prosentase penduduk meninggal yang di lengkapi Akta Kematian</p> <p>Prosentase Hasil Survey kepuasan masyarakat</p>	<p>1. Sekretaris</p> <p>2. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk</p> <p>3. Kepala Bidang Pencatatan Sipil</p> <p>4. Kepala Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>5. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan</p>	Laporan SKM	<p>Jml kutipan akta kematian yg telah diterbitkan sampai dgn th (X) / Jumlah Kematian yang terjadi sampai dengan tahun (X) × 100%</p> <p>Total nilai rata-rata tertimbang x 25</p> <ul style="list-style-type: none"> • Total nilai rata-rata tertimbang didapat dari jumlah nilai rata-rata tertimbang per unsur • Jumlah nilai rata-rata tertimbang per unsur didapat dari total nilai unsur di bagi jumlah responden
----	----------------------------------	---	--	-------------	---



Pihak Kedua,

Ir. Raj Dnarmawijaya Mantra, SE. M.Si



Denpasar, 14 Pebruari 2019

Pihak Pertama,

Ir. Anak Agung Istri Agung, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19610707 198703 2 010

3.2 Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk meneliti keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilakukan pengukuran kinerja tahunan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2018 (terlampir) yang telah ditetapkan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Maksud dilakukan evaluasi kinerja adalah agar organisasi dapat mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dimasa yang akan datang.

Hasil Analisis terhadap Pengukuran Capaian Kinerja yaitu sebagai berikut : Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

Persentase Pencapaian Rencana / Tingkat Capaian :

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Adapun evaluasi yang dilakukan adalah dengan membandingkan target dengan realisasi/capaian kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut :

3.3.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Dalam usaha untuk merealisasikan visi dan misi yang ada maka diperlukan wujud nyata upaya yang harus dilakukan. Sesuai dengan kebijakan nasional di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, daerah perlu melakukan terobosan



untuk merealisasikannya.

Program yang direncanakan untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebanyak 4 (empat) Program dan 15 (lima belas) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 8.358.345.700 :

Target :

1. Belanja tidak langsung	Rp. 10.006.152.600 (100%)
- Belanja pegawai	Rp. 10.006.152.600
2. Belanja Langsung	Rp. 8.358.345.700 (100%)
- Belanja Pegawai	Rp. 11.250.000
- Belanja barang dan jasa	Rp. 7.099.469.700
- Belanja Modal	Rp. 1.247.626.000
3. Total Belanja Langsung dan Tak Langsung	Rp. 18.364.498.300 (100%)

Realisasi :

1. Belanja Tidak Langsung	Rp. 9.454.842.418 (94%)
- Belanja Pegawai	Rp. 9.454.842.418
2. Belanja Langsung	Rp. 7.589.930.819 (91%)
- Belanja Pegawai	Rp. 11.250.000
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 6.400.836.349
- Belanja Modal	Rp. 1.177.844.470
3. Total Belanja Langsung dan Tak Langsung	Rp. 17.044.773.237 (93%)

Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam Tabel 3.2. berikut :



Tabel 3.2.
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2018

Program/Kegiatan	Target		Realisasi			
	Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
	Volume	(Rp)	Volume	%	Volume	%
Belanja Tidak Langsung						
1 Belanja Pegawai	100%	10.006.152.600	100%	100	9.454.842.418	94 %
Belanja Langsung						
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
a. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 laporan	4.472.262.000	100 %	100	4.311.062.303	96,40 %
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 laporan	1.233.779.700	100 %	100	1.118.598.570	90,66 %
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 laporan	96.000.000	100 %	100	56.024.896	58,36 %
4 Program Penataan Administrasi Kependudukan						
a. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	50 buku dan 75 buku	27.750.000	50 buku dan 75 buku	100	25.250.000	90,99%
b. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 laporan	26.680.000	1 laporan	0	0	0 %
c. Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50 orang	20.430.000	50 orang	100	19.281.600	94,38 %
d. Sosialisasi kependudukan dan pencatatan sipil	1 laporan	17.155.000	1 laporan	0	0	0 %
e. Moitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 laporan	109.525.000	1 laporan	100	105.248.600	96,10 %
f. Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendetang	Penduduk pendatang	50.000.000	Penduduk pendatang	100	45.915.000	91,83 %



Program/Kegiatan	Target		Realisasi			
	Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
	Volume	(Rp)	Volume	%	Volume	%
g. Pembuatan penyusunan profil perkembangan kependudukan	50 buku	37.080.000	50 buku	100	33.320.600	89,86%
h. Pelaksanaan KTP-el di Kota Denpasar	543.997 KTP	35.100.000	543.997 KTP	0	0	0%
i. Pengolahan dan Pengarsipan Data Catatan Sipil	1700 buku	515.650.000	1.700 buku	100	505.256.200	97,98%
j. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	4 laporan	1.308.089.000	4 laporan	100	1.198.613.050	91,63%
k. Sertifikasi ISO 9001 : 2015	1 laporan	221.975.000	1 laporan	0	0	0
l. Inovasi Pelayanan Publik	1 inovasi	186.870.000	1 inovasi	100	171.360.000	91,7%

3.3.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Dalam rangka pencapaian kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tahun 2015 sampai dengan 2018. Total Anggaran yang digunakan untuk kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017 dan 2018 yaitu :

- Total Belanja Anggaran untuk **Tahun 2015** adalah sebesar Rp.12.896.732.000,- terealisasi sebesar Rp. 11.802.063.308 sehingga prosentase yang dicapai sebesar 91,51%
- Total Belanja Anggaran **Tahun 2016** adalah sebesar Rp.12.082.630.350,- terealisasi sebesar Rp. 11.589.298.952 sehingga prosentase yang dicapai sebesar 95,92%
- Total Belanja Anggaran **Tahun 2017** adalah sebesar Rp.15.470.924.378,- terealisasi sebesar Rp.13.580.687.396,- sehingga prosentase yang dicapai pada tahun 2017 sebesar 87,78%.



- d. Sedangkan untuk Belanja Anggaran **Tahun 2018** adalah sebesar Rp. 18.364.498.300,- terealisasi sebesar Rp. 17.044.773.237,- sehingga prosentase yang dicapai pada tahun 2018 sebesar 93%.

Penjelasan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar **Tahun 2015** diwujudkan melalui 4 program dan 17 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.947.109.500 :

Target :

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Belanja tidak langsung | Rp. 6.949.622.500 (100%) |
| - Belanja Pegawai | Rp. 6.949.622.500 |
| 2. Belanja Langsung | Rp. 5.947.109.500 (100%) |
| - Belanja Pegawai | Rp. 10.000.000 |
| - Belanja Barang dan Jasa | Rp. 4.830.245.500 |
| - Belanja Modal | Rp. 1.106.864.000. |
| 3. Total Belanja Langsung dan Tak Langsung | Rp. 12.896.732.000 (100%) |

Realisasi :

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Belanja tidak langsung | Rp. 6.697.811.577 (96,38 %) |
| - Belanja Pegawai | Rp. 6.697.811.577 |
| 2. Belanja Langsung | Rp. 5.104.251.731 (85,83%) |
| - Belanja Pegawai | Rp. 10.000.000 |
| - Belanja Barang dan Jasa | Rp. 4.063.217.731 |
| - Belanja Modal | Rp. 1.031.034.000 |
| 3. Total Belanja Langsung dan Tak Langsung | Rp. 11.802.063.308 (91,51%) |



Tabel 3.3
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Program/Kegiatan	Target		Realisasi			
	Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
	Volume	(Rp)	Volume	%	Volume	%
Belanja Tidak Langsung						
1 Belanja Pegawai	100%	6.949.622.500,00	100%	100	6.697.811.577,00	96,38%
Belanja Langsung						
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Laporan	1.842.910.000,00	1 Laporan	100	1.383.127.131,00	75,05%
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Laporan	952.272.000,00	1 Laporan	100	850.287.600,00	89,29%
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	100	139.548.200,00	93,03%
b. Bintek Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Kerja Aparatur Pelayanan Administrasi	1 laporan	117.000.000,00	1 Laporan	100	117.000.000,00	100 %
4 Program Penataan Administrasi Kependudukan						
a. Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil	1 Laporan	394.367.500,00	1 Laporan	100	344.664.500,00	87,40%
b. Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Denpasar	1 Laporan	22.600.000,00	1 Laporan	100	22.143.500,00	97,98%



Program/Kegiatan	Target		Realisasi			
	Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
	Volume	(Rp)	Volume	%	Volume	%
c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Laporan	211.387.000,00	1 laporan	100	192.613.200,00	91,12%
d. Pengolahan data Catatan Sipil	1.500 buku	62.165.000,00	1.500 buku	100	62.083.000,00	99,87%
e. Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	4 Kecamatan	176.238.000,00	4 Kecamatan	100	116.630.500,00	66,18%
f. Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendetang	100 %	50.000.000,00	100%	100	50.000.000,00	100%
g. Pelaksanaan E – KTP di Kota Denpasar	543.997 KTP	1.241.397.500,00	543.997 KTP	100	1.198.848.900,00	96,57%
h. Penertiban Administrasi Kependudukan	43 Desa / Kelurahan	142.592.500,00	43 Desa / Kelurahan	100	87.750.000,00	61,54%
i. Pengawasan Orang Asing Pemegang SKTT	50 buku	73.553.000,00	100 %	100	67.212.500,00	91,38%
j. Kearsipan Dokumen Kependudukan Berbasis IT	1 Laporan	285.050.000,00	1 Laporan	100	270.453.200,00	94,88%
k. Pembuatan Penyusunan Profile Perkembangan Kependudukan	50 buku	52.451.500,00	50 buku	100	46.314.500,00	88,30%
l. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM	1 Laporan	27.325.000,00	1 Laporan	100	23.675.000,00	86,64%
m. Pengendalian Informasi Yang dapat Dikases Masyarakat	1 Laporan	145.800.000,00	1 Laporan	100	131.900.000,00	90,47%

2. Program yang direncanakan untuk dapat dilaksanakan pada **Tahun 2016** adalah sebanyak 4 (empat) Program dan 16 (enam belas) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.145.837.050

Target :

1. Belanja tidak langsung **Rp. 6.936.793.300 (100%)**
 - Belanja pegawai **Rp. 6.936.793.300**
2. Belanja Langsung **Rp. 5.145.837.050 (100%)**
 - Belanja Pegawai **Rp. 11.250.000**
 - Belanja barang dan jasa **Rp. 4.632.932.050**
 - Belanja Modal **Rp. 501.655.000**



3. Total Belanja Langsung dan Tak Langsung Rp. **12.082.630.350 (100%)**

Realisasi :

1. Belanja Tidak Langsung Rp. **6.909.751.297 (99,61%)**
 - Belanja Pegawai Rp. 6.909.751.297
2. Belanja Langsung Rp. **4.679.547.655 (90,74%)**
 - Belanja Pegawai Rp. 3.000.000
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.257.642.655
 - Belanja Modal Rp. 418.905.000
3. Total Belanja Langsung dan Tak Langsung. Rp. **11.589.298.952 (95,92%)**

Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2016

Program/Kegiatan	Target		Realisasi			
	Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
	Volume	(Rp)	Volume	%	Volume	%
Belanja Tidak Langsung						
1 Belanja Pegawai	100%	6.936.793.300,00	100%	100	6.909.751.297,00	99,61%
Belanja Langsung						
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
a. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Laporan	2.268.397.000,00	1 Laporan	100	2.197.841.405,00	96,38 %
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Laporan	1.067.741.000,00	1 Laporan	100	956.430.630,00	89,58%
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7 OK	70.000.000,00	7 OK	100	32.310.900,00	46,16%
4 Program Penataan Administrasi Kependudukan						
a. Peningkatan Pelayanan	15 Lokasi	305.875.000,00	15 Lokasi	100	264.499.365,00	86,47 %



Program/Kegiatan	Target		Realisasi			
	Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
	Volume	(Rp)	Volume	%	Volume	%
Publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil						
b. Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Denpasar	1 Laporan	61.530.000,00	1 Laporan	100	59.030.000,00	95,94%
c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Laporan	267.730.000,00	1 laporan	100	238.324.500,00	89,02%
d. Pengolahan data Catatan Sipil	800 buku	76.192.500,00	800 buku	100	76.192.500,00	100%
e. Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendetang	Penduduk pendatang	50.000.000,00	Penduduk pendatang	100	49.931.000,00	99,86%
f. Pelaksanaan E – KTP di Kota Denpasar	543.997 KTP	356.644.050,00	543.997 KTP	100	311.660.155,00	87,39%
g. Penertiban Administrasi Kependudukan	43 Desa / Kelurahan	185.312.500,00	43 Desa / Kelurahan	100	141.312.500,00	76,26%
h. Pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan	1 laporan	50.000.000,00	1 laporan	100	47.740.000,00	95,48 %
i. Audit Surveillance ISO 9001 : 2008	1 Laporan	105.740.000,00	1 Laporan	100	101.139.500,00	95,65 %
j. Pembuatan Penyusunan Profile Perkembangan Kependudukan	50 buku	132.840.000,00	50 buku	100	90.780.200,00	68,34%
k. Evaluasi Pencapaian SPM	50 buku	21.425.000,00	50 buku	100	15.495.000,00	72,32 %
l. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan	100 DVD dan Master	61.410.000,00	100 DVD dan Master	100	32.925.000,00	53,63 %
m. Pengendalian Informasi Yang dapat Dikases Masyarakat	Aplikasi SKM dan Aplikasi M.Kios	65.000.000,00	Aplikasi SKM dan Aplikasi M.Kios	100	63.935.000,00	98,36 %



Tabel 3.5.
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2016

Program/Kegiatan	Target		Realisasi			
	Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
	Volume	(Rp)	Volume	%	Volume	%
Belanja Tidak Langsung						
1 Belanja Pegawai	100%	8.516.652.700	100%	100	7.395.984.790	86,84 %
Belanja Langsung						
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
a. Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	4.413.044.878	100 %	100	3.850.719.926	87,26 %
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	995.067.800	100 %	100	910.116.530	91,46 %
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	44.000.000	100 %	100	41.983.150	95,42 %
4 Program Penataan Administrasi Kependudukan						
a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	8 Desa/ Lurah terbaik	109.300.000	8 Desa / lurah terbaik	100	109.300.000	100 %
b. Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendetang	Penduduk pendatang	50.000.000	Penduduk pendatang	100	49.965.500	99,93 %
c. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM	100%	21.258.000	100 %	100	15.188.000	71,45 %
d. Penyusunan Sistem Informasi Teknologi Pelayanan Publik	100 %	51.220.000	100 %	100	31.004.500	60,53 %
e. Pengolahan dan Pengarsipan Data Catatan Sipil	100 %	70.300.000	100 %	100	69.624.000	99,04 %
f. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	100 %	1.200.081.000	100 %	100	1.106.801.000	92,23 %



Selanjutnya dapat dilihat anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun Anggaran tahun 2015-2018, seperti berikut ini :

Tabel 3.6.
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan
Belanja Langsung dari Tahun 2015 - 2018

No.	Belanja	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Belanja tidak langsung	6.949.622.500	6.697.811.577 (96,38 %)	6.936.793.300	6.909.751.297 (99,61%)	8.516.652.700	7.395.984.790 (86,84%)	10.006.152.600 (100%)	9.454.842.418 (94%)
2.	Belanja Langsung	5.947.109.500	5.104.251.731 (85,83%)	5.145.837.050	4.679.547.655 (90,74%)	6.954.271.678	6.184.702.606 (88,93%)	8.358.345.700 (100%)	7.589.930.819 (91%)
	Jumlah belanja tidak langsung dan belanja langsung	12.896.732.000	11.802.063.308 (91,51%)	12.082.630.350	11.589.298.952 (95,92%)	15.470.924.378	13.580.687.396 (87,78%)	18.364.498.300 (100%)	17.044.773.237 (93%)

Dengan demikian dapat disampaikan bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dapat dilaksanakan dengan baik tanpa menghadapi kendala yang berarti, atau semua kegiatan yang dilaksanakan dapat dicapai dengan baik.

3.3.3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator kinerja secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes). Suatu indikator kinerja dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2016-2021 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan suatu daerah membutuhkan indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (Tiga) aspek yaitu : Aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah sedangkan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagai berikut:

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021)
1	Jumlah Penduduk Wajib KTP-el	342.601	349.282	356.093	363.037	370.333	337.333	439.283
2	Persentase Kepemilikan KTP-el	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran	13.475	14.149	14.856	15.599	16.379	17.198	18.058
4	Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan	3.019	3.170	3.329	3.495	3.670	3.854	4.047
5	Ketersediaan database kependudukan skala Kota	634.484	656.881	679.281	701.697	724.081	746.528	771.163



Adapun Rumusan RPJMD 2016-2021 yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagai berikut :

No	Rumusan Sasaran RPJMD 2016-2021	Indikator Kinerja Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Pelayanan kependudukan dan KB	1. Laju pertumbuhan penduduk	3,53 %	3,41%	3,3 %	3,19%	3,1 %	3,30
		2. Jumlah penduduk yang wajib KTP-el memiliki KTP-el	349.282	356.093	363.037	370.116	337,33	439.283
		3. Jumlah Akta Lahir yang diterbitkan	11.885	11.291	10.726	10.190	.681	9.197

Analisis dilakukan terhadap pencapaian kinerja terhadap instansi secara keseluruhan. Berdasarkan analisis yang dilakukan atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan Walikota Denpasar berupa Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018 serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Sasaran yang dicapai yaitu terwujudnya sistem data kependudukan diseluruh Kota Denpasar yang tertib dan terpadu dengan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU). Analisis pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagai pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Analisis prosentase Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga

Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga dalam Tahun 2018 sebanyak 170.092 KK. Di Tahun 2018 dirancang target 100% penduduk memiliki kartu keluarga untuk pemenuhan administrasinya sehingga dari target 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%.

b. Analisis Prosentase Penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk

Penduduk yang memiliki KTP-el dalam tahun 2018 sebanyak 419.489 jiwa

sedangkan jumlah penduduk yang wajib memiliki E-KTP untuk umur 17 Tahun yang diterbitkan di tahun 2018 sebanyak 502.967 jiwa, dimana kepemilikan KTP-el yang ditargetkan 100% hanya terealisasi 83,40% sehingga capaian kinerja belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena banyak penduduk yang sudah memiliki KTP-el Denpasar berpindah domisili ke Daerah lain, dan begitu sebaliknya, banyak penduduk Daerah lain yang pindah ke Wilayah Kota Denpasar, mereka belum melakukan perekaman KTP-el ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan membuat identitas sesuai dengan alamat yang di Denpasar, serta menurunnya antusias masyarakat untuk melakukan perekaman KTP-el karena keterbatasan blangko KTP-el Sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi pencapaian target perekaman KTP-el di Kota Denpasar.

c. Analisis Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan tahun 2018 sebanyak 14.189 akta dari jumlah akta kelahiran yang terjadi pada tahun 2018 sebanyak 14.189 akta, dimana kepemilikan Akta Kelahiran yang ditargetkan 90% terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 111%.

d. Analisis Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi dengan Akta Kematian . Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan tahun 2018 sebanyak 4.227 orang, dari jumlah penduduk yang meninggal pada tahun 2018 sebanyak 4.227 orang yang pelaporannya tepat waktu, sehingga target penduduk yang memiliki Akta Kematian ditargetkan 70%, terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 143%

3.3.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Evaluasi Kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Maksud dilakukan evaluasi kinerja adalah agar organisasi dapat mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab - sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dimasa yang akan datang.

Adapun evaluasi yang dilakukan adalah dengan membandingkan target dengan realisasi/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan Standar Nasional dapat dilihat dalam tabel berikut :



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% 5=4:3
1	2	3	4	5
1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan di seluruh Kota Denpasar yang tertib dan terpadu	- Prosentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga	100 %	100 %	100%
	- Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk	100 %	100 %	100%
	- Prosentase kepemilikan Akta Kelahiran	90 %	100 %	111%
	- Prosentase penduduk meninggal yang di lengkapi Akta Kematian	70 %	100 %	143%
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat	Prosentase hasil survey kepuasan masyarakat	81 %	86,75 %	107%

Adapun hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terwujudnya tertib administrasi kependudukan diseluruh Kota Denpasar yang tertib dan terpadu

Untuk mencapai sasaran terwujudnya tertib administrasi kependudukan di seluruh Kota Denpasar yang tertib dan terpadu maka Indikator Kinerjanya dapat diuraikan sebagai berikut :

3.3.5. Prosentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga

Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat nomor induk kependudukan, data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Cakupan penerbitan KK adalah jumlah dokumen KK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga dalam satu wilayah pada tahun yang sama. Untuk meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menargetkan Penerbitan Kartu Keluarga 100%. Untuk tahun 2018 capaian kinerja atas pelayanan dokumen kependudukan sebesar 100%. Hal ini

diukur dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

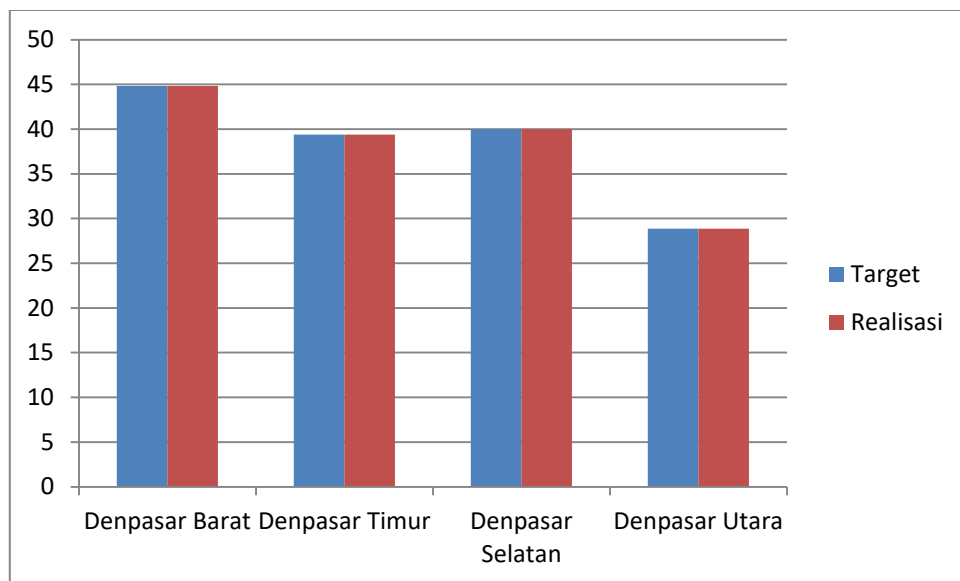
Prosentase Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga dapat dilihat dalam tabel 3.7. berikut :

Tabel 3.7
Kepemilikan Kartu Keluarga di Kota Denpasar Tahun 2018

No.	Kecamatan	Target	Realisasi
1.	Denpasar Barat	44.842	44.842
2.	Denpasar Utara	39.398	39.398
3.	Denpasar Selatan	40.000	40.000
4.	Denpasar Timur	28.852	28.852
	Kota Denpasar	170.092	170.092

Gambar 1.

Grafik Kepemilikan Kartu Keluarga

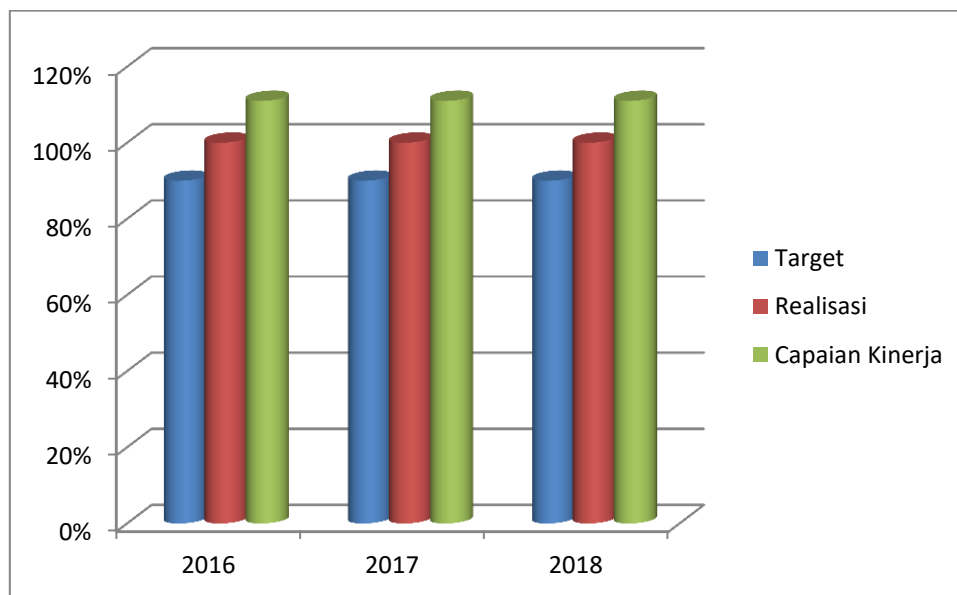


Tabel 3.8

Perkembangan Capaian Kinerja Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2016-2018

No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2016	100%	100%	100%
2	2017	100%	100%	100%
3	2018	100%	100%	100%

Gambar 2.

Grafik Perkembangan Capaian Kinerja Kepemilikan Kartu Keluarga

Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga dalam tahun 2016 dirancang 100% terealisasi 100%, tahun 2017 dirancang 100% terealisasi 100% sedangkan tahun 2018 dirancang 100% dan terealisasi 100%. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 target telah tercapai, hal ini disebabkan karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengambil langkah-langkah dengan selalu memberikan pemahaman akan arti penting administrasi kependudukan.

3.3.6. Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cakupan penerbitan KTP-el adalah jumlah dokumen KTP-el yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah wajib KTP-el dalam satu wilayah pada tahun yang sama. Jumlah wajib KTP-el dihitung berdasarkan *database*

kependudukan Kabupaten / Kota mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun berjalan. Dalam database kependudukan ini sudah termasuk data KTP-el baru atau penggantian KTP-el karena habis masa berlakunya, atau yang belum habis masa berlakunya dikarenakan pindah datang, rusak atau hilang. Untuk meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menargetkan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 100%. Untuk tahun 2018 capaian kinerja atas pelayanan dokumen kependudukan sebesar 100%. Hal ini diukur dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Prosentase Penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dapat dilihat dalam tabel berikut :

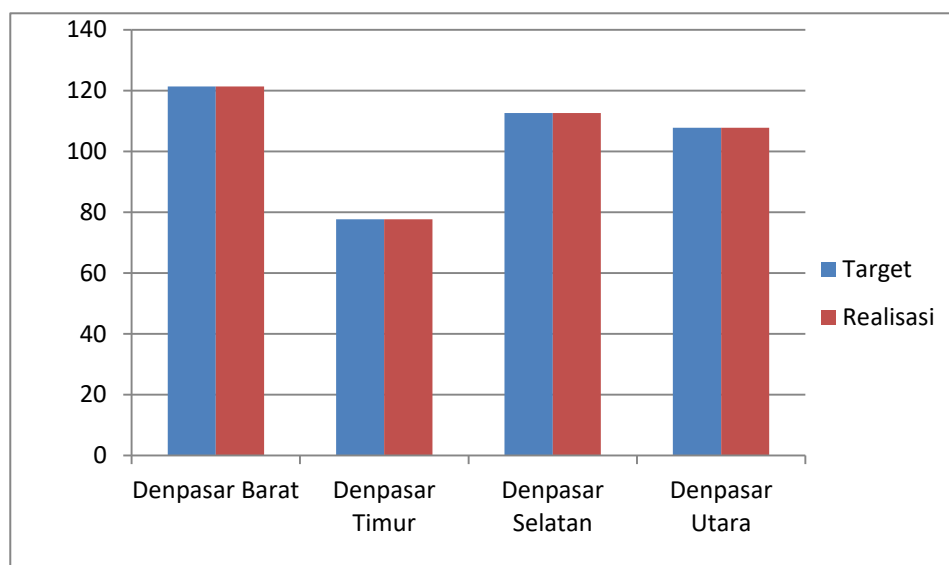
Tabel 3.9.

Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk di Kota Denpasar Tahun 2018

No.	Kecamatan	Target	Realisasi
1	Denpasar Barat	121.361	121.361
2	Denpasar Timur	77.689	77.689
3	Denpasar Selatan	112.656	112.656
4	Denpasar Utara	107.783	107.783
	Kota Denpasar	419.489	419.489

Gambar 3

Grafik Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk



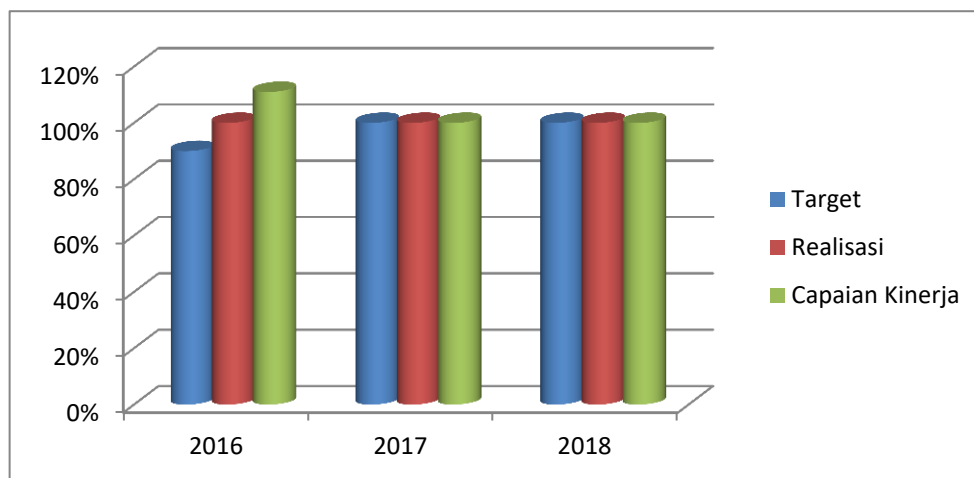
Tabel 3.10

Perkembangan Capaian Kinerja Kepemilikan KTP-el Tahun 2016 - 2018

No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2016	100%	100%	111%
2	2017	100%	100%	100%
3	2018	100%	100%	100%

Gambar 2.

Grafik Perkembangan Capaian Kinerja Kepemilikan KTP-el



Keluarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dalam tahun 2016 dirancang 100% terealisasi 100% , tahun 2017 dirancang 100% terealisasi 100% sedangkan tahun 2018 dirancang 100% dan terealisasi 100%. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 target telah tercapai, hal ini disebabkan karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengambil langkah-langkah dengan selalu memberikan pemahaman akan arti penting administrasi kependudukan

3.3.7. Prosentase kepemilikan Akta Kelahiran

Kutipan Akta Kelahiran adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kelahiran yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada penduduk yang baru lahir dan kepada penduduk yang belum mempunyai/belum diterbitkan kutipan akta disebuah wilayah Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran adalah jumlah dokumen kutipan akta kelahiran yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil sampai dengan tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah kelahiran yang terjadi dalam satu wilayah sampai dengan tahun yang bersangkutan. Untuk meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menargetkan Penerbitan Akta Kelahiran 90%. Untuk tahun 2018 capaian kinerja atas pelayanan dokumen kependudukan sebesar 111%. Hal ini diukur dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100}{90} \times 100\% = 111\%$$

Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran dapat dilihat dalam Tabel 3.11 berikut :

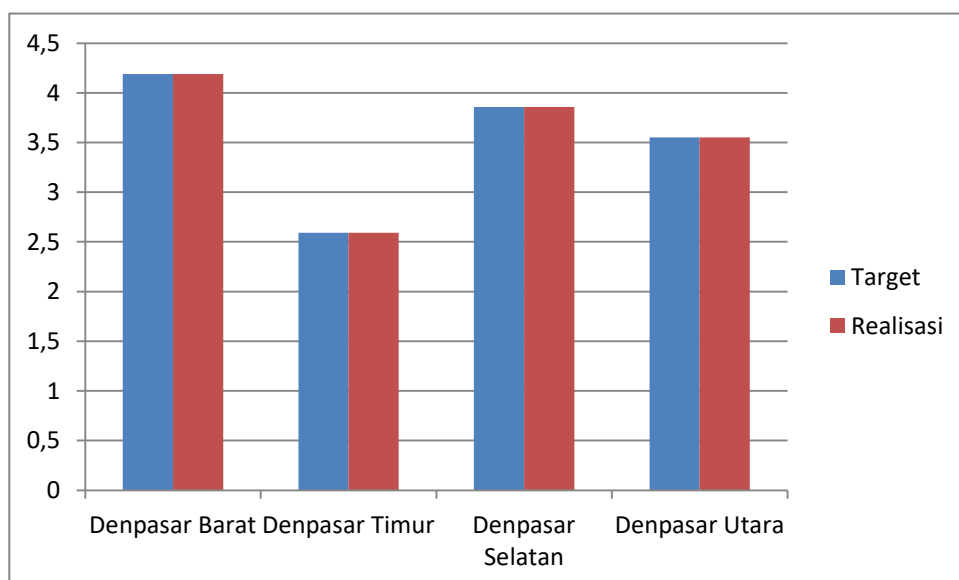
Tabel 3.11

Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Denpasar Tahun 2018

No.	Kecamatan	Target	Realisasi
1	Denpasar Barat	4.188	4.188
2	Denpasar Timur	2.593	2.593
3	Denpasar Selatan	3.858	3.858
4	Denpasar Utara	3.550	3.550
	Kota Denpasar	14.189	14.189

Gambar 3

Grafik Kepemilikan Akta Kelahiran



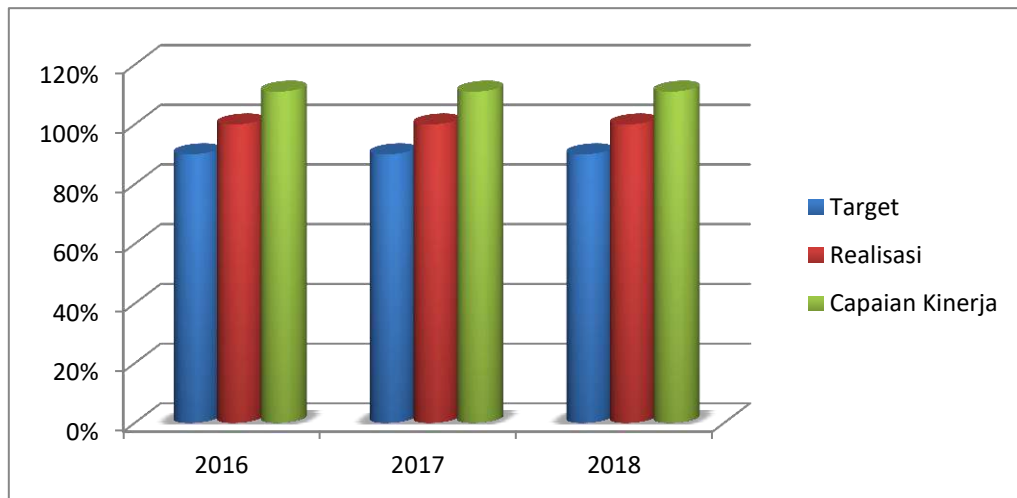
Tabel 3.12

Perkembangan Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2016-2018

No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2016	90%	100%	111%
2	2017	90%	100%	111%
3	2018	90%	100%	111%

Gambar 4

Grafik Perkembangan Capaian Kinerja Kepemilikan Akta Kelahiran



Keluarga yang memiliki Akta Kelahiran dalam tahun 2016 dirancang 90% terealisasi 100% , tahun 2017 dirancang 90% terealisasi 100% sedangkan tahun 2018 dirancang 90% dan terealisasi 100%. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 target telah tercapai.

3.3.8. Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi Akta Kematian

Akta Kematian adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kematian yang meregistrasi setiap kematian sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada keluarga penduduk yang melaporkan kematian.

Cakupan Pelayanan penerbitan kutipan Akta Kematian adalah jumlah dokumen kutipan Akta Kematian yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah kematian yang terjadi dalam satu wilayah sampai dengan tahun yang bersangkutan. Jumlah Kematian yang terjadi sampai dengan tahun yang bersangkutan adalah jumlah kematian yang harus diterbitkan kutipan akta kematiannya yang dihitung berdasarkan penduduk yang

meninggal dunia dan masih mempunyai NIK sesuai dengan database kependudukan.

Untuk meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menargetkan Penerbitan Akta Kematian 70%. Untuk tahun 2018 capaian kinerja atas pelayanan dokumen kependudukan sebesar 143%. Hal ini diukur dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100}{70} \times 100\% = 143\%$$

Prosentase Penduduk Meninggal yang dilengkapi dengan Akta kematian dapat dilihat pada Tabel 3.13 berikut :

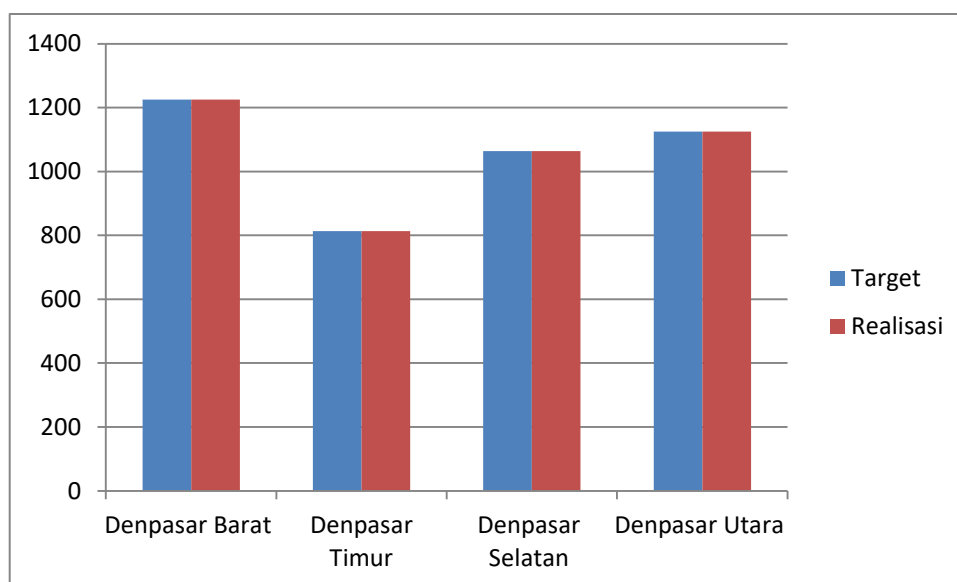
Tabel 3.13

Kepemilikan Akta Kematian di Kota Denpasar Tahun 2018

No.	Kecamatan	Target	Realisasi
1	Denpasar Barat	1.225	1.225
2	Denpasar Timur	813	813
3	Denpasar Selatan	1.064	1.064
4	Denpasar Utara	1.125	1.125
	Kota Denpasar	4.227	4.227

Gambar 1.4.1

Grafik Kepemilikan Akta Kematian



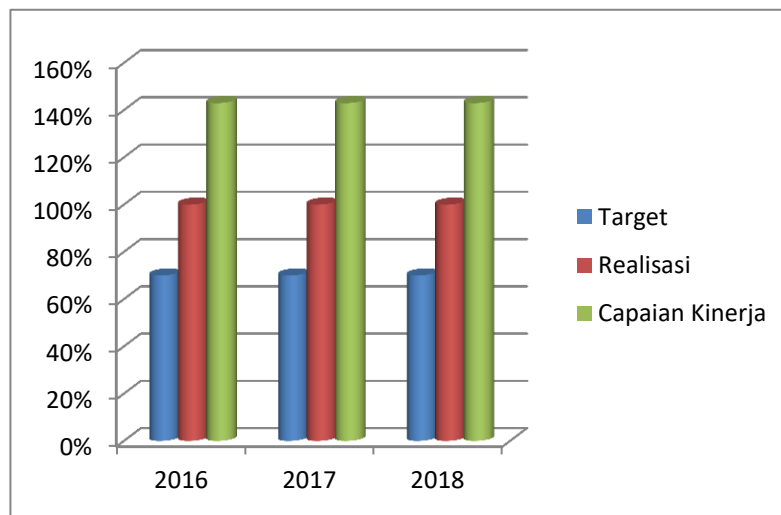
Tabel 3.14

Perkembangan Prosentase Kepemilikan Akta Kematian Tahun 2016 - 2018

No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2016	70%	100%	143%
2	2017	70%	100%	143%
3	2018	70%	100%	143%

Gambar 5

Grafik Perkembangan Capaian Kinerja Kepemilikan Akta Kematian



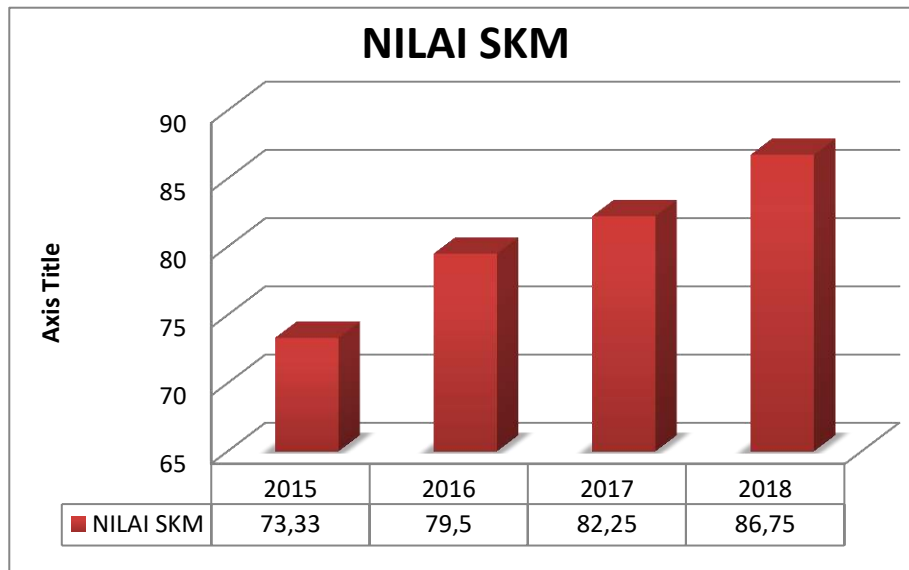
Keluarga yang memiliki Akta Kematian dalam tahun 2016 dirancang 70% terealisasi 100% , tahun 2017 dirancang 70% terealisasi 100% sedangkan tahun 2018 dirancang 70% dan terealisasi 100%. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 target telah tercapai.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat maka Indikator Kinerjanya dapat diuraikan pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	% Capaian Tahun 2018
1. Prosentase hasil survey kepuasan Masyarakat	81%	73,33%	79,50%	82,25 %	86,75%	107%

Pada indikator kinerja prosentase hasil survei kepuasan masyarakat pada tahun 2015 SKM teralisasi 73,33% dari target 75,5 %, Tahun 2016 SKM terealisasi 79,50%, dari target 80%, Tahun 2017 SKM terealisasi 82,25% dari target 80,5% dan tahun 2018 teralisasi 86,75 % dari target yang ditetapkan 81% maka tahun 2018 capaian nilai SKM tergolong **Sangat Baik** dengan Nilai mencapai **86,75%** Sehingga survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan apabila realisasi tahun 2018 dibandingkan dengan target prosentase capaiannya sebesar **107%**



3.3.9. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan telah ditetapkan kebijakan yang bersifat nasional sebagaimana tertuang dalam Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang secara efektif harus diberlakukan pada tahun 2014. Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan Administrasi Negara.

Jika penerbitan dokumen kependudukan menganut azas maksimal dalam waktu penyelesaiannya, ada kesan lambat dan berbeli-belit. Sementara gaya hidup dan tuntutan masyarakat perkotaan serba instan. Waktu penyelesaian dokumen kependudukan yang *relative* lama ini mempengaruhi antusias masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukannya. Hal ini menyebabkan :



1. Masyarakat enggan mengurus Administrasi Kependudukannya sendiri.
2. Masyarakat menganggap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi penghambat kelancaran administrasi seperti sekolah, perbankan, pekerjaan dan lain-lain.
3. Memungkinkan terjadinya pungutan liar, dimana petugas mempunyai celah untuk mempercepat dan memprioritaskan masyarakat yang bersedia membayar.
4. Masyarakat cenderung menggunakan pihak ketiga (Calo) dalam kepengurusan dokumen kependudukannya. Hal ini memunculkan kesan mahal kepengurusan dokumen kependudukan.

Sebelum diadakan analisis terhadap pencapaian kinerja Dinas, perlu disampaikan terlebih dahulu upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan pencapaian target kinerja tersebut diatas diantaranya adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan sosialisasi ke masyarakat akan pentingnya melengkapi administrasi kependudukan
- Melaksanakan Gebyar Pelayanan Akta Pencatatan Sipil dalam even tertentu, serta
- Secara rutin memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan berupa KK, KTP-el dan Akta Pencatatan Sipil baik di kantor maupun dengan jemput bola ke Desa/Kelurahan.

Visualisasi Dalam Pelaksanaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan



Visualisasi Dalam kegiatan Jemput Bola



Visualisasi Dalam Pelaksanaan Jemput Bola Perekaman KTP-el



3.3.10. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Faktor eksternal yang mendatangkan manfaat atau keuntungan besar di kemudian hari dikategorikan sebagai peluang (*Opportunities*). Sebaliknya suatu faktor eksternal yang dinilai tidak mendatangkan manfaat, bahkan dapat menghambat dalam mencapai sasaran atau tujuan dikategorikan sebagai ancaman (*Threats*). Ancaman adalah suatu kondisi yang dapat menghalangi, bahkan menimbulkan resiko kegagalan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan atau diharapkan.

Analisis yang menggunakan faktor lingkungan untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan/diharapkan disebut analisis SWOT.

Adapun faktor Eksternal yang mendatangkan Tantangan/Ancaman (*Threats*) sebagai berikut :

1. Tingginya jumlah penduduk pendatang.
2. Adanya pemalsuan data dokumen kependudukan
3. Penyalahgunaan hak akses database.

Berdasarkan analisis faktor Eksternal dan faktor Internal diatas, dengan menggunakan pendekatan Analisis SWOT (*Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats*), maka sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Strategi SO (mendayagunakan Kekuatan dan memanfaatkan Peluang)
2. Strategi ST (mendayagunakan Kekuatan untuk menghindari Ancaman)
3. Strategi WO(mengatasi Kelemahan dengan memanfaatkan Peluang)
4. Strategi WT(meminimalkan Kelemahan dan menghindari Ancaman)

Adapun faktor Eksternal yang mendatangkan Peluang (*Opportunities*) sebagai berikut :

1. Tertib administrasi kependudukan
2. Database kependudukan yang valid
3. Pelayanan yang memuaskan masyarakat
4. Terbitnya Dokumen Kependudukan yang akurat
5. Adanya Perda Kependudukan yang memadai
6. Terlaksananya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengemban tugas dan tanggungjawab di bidang administrasi kependudukan. Sebagai unit organisasi



yang melaksanakan tugas pembangunan melalui administrasi atau manajemen dalam arti sempit, juga sebagai unit yang melaksanakan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat baik mengenai pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk berupa pelayanan penerbitan biodata penduduk. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK). Sedangkan Pencatatan Sipil berupa Akta Pencatatan Sipil seperti Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, Akta Pengangkatan Anak, Akta Pengakuan Anak.

Dalam melaksanakan tugas tersebut tidak terlepas dari faktor lingkungan baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Penentuan faktor internal dan faktor eksternal pendekatannya berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab. Kemampuan melaksanakan atau menyelesaikan tugas baik dan benar dengan sumber daya yang cukup tersedia serta berada dalam kondisi baik.

3.4 Realisasi Anggaran

Anggaran belanja dalam APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tahun 2018 belanja dengan anggaran Rp 18.364.498.300 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp 10.006.152.600 dan Belanja Langsung sebesar Rp 8.358.345.700. Belanja Langsung Terdiri Belanja Pegawai Rp 3.000.000 , Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 4.469.262.000 dan Belanja Modal Rp 718.606.000

Realisasi Anggaran di Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 17.044.773.237 dengan capaian realisasi 93%. Realisasi tersebut Terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp 9.454.842.418 dengan capaian 94% dan Belanja Langsung Rp 7.589.930.819 dengan capaian 91%. Realisasi Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 3.000.000, belanja barang dan Jasa Rp 4.308.062.303 dan belanja modal sebesar Rp 675.896.670.

Alokasi dan Realisasi Anggaran yang dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tahun 2018 dalam memujudkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci pada tabel berikut :

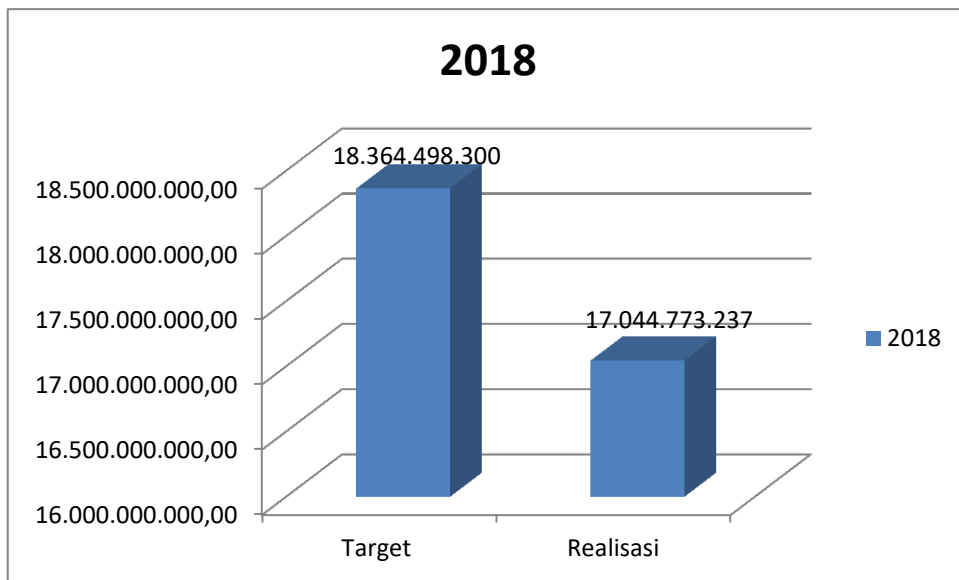
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan diseluruh Kota Denpasar yang tertib dan terpadu	1. Prosentase keluarga yang memiliki kartu keluarga.	1. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	1.308.089.000	1.198.613.050	91,63%
	2. Prosentase penduduk yang memiliki KTP.	2. Monitoring	109.525.000	105.248.600	96,10%



2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	3. Prosentase Kepemilikan akta kelahiran.	Evaluasi dan pelaporan				
		3. Pengendalian	50.000.000	45.915.000	91,83%	
	4. Prosentase penduduk yang meninggal yang dilengkapi dengan Akta Kematian.	Mobilitas Penduduk Pendetang				
		4. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil	26.680.000	0	0%	
		5. Pelaksanaan KTP-el di Kota Denpasar	35.100.000	0	0%	
		6. Sosialisasi kependudukan dan pencatatan sipil	17.155.000	0	0%	
		1. Prosentase hasil survei kepuasan masyarakat	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.472.262.000	4.311.062.303	96,4%
			2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.233.779.700	1.118.598.570	90,66%
			3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	96.000.000	56.024.896	58,36%
			4. Pengolahan dan pengarsipan Data Catatan Sipil	515.650.000	505.256.200	97,98%
			5. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	27.750.000	25.250.000	90,99%
			6. Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	20.430.000	19.281.600	94,38%
			7. Pembuatan penyusunan profil perkembangan	37.080.000	33.320.600	89,86%



		kependudukan			
		8. Sertifikasi ISO 9001: 2015	221.975.000	0	0%
		9. Inovasi Pelayanan Publik	186.870.000	171.360.000	91,7%



Hal yang terkait dengan realisasi anggaran untuk belanja langsung antara lain :

1. Dari Empat (4) program dan Lima belas (15) kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sudah mencapai daya serap keuangan sebesar 91%
2. Untuk Capaian Indikator Kinerja terhadap anggaran sudah efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.



BAB IV

PENUTUP

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar mengemban tugas dibidang Administrasi Kependudukan maka hal ini melekat erat dengan pelayanan publik, terutama dalam memberikan pelayanan mengenai dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang telah dirasakan manfaat penting dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam upaya mewujudkan pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat, jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar berusaha mengatasi kendala dan keterbatasan yang ada, baik itu keterbatasannya sumber daya manusia dan anggaran yang mengacu pada prinsip pelayanan yang bersifat transparan, adil, efektif dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk pencapaian sasaran yang diukur dari beberapa Indikator Kinerja Utama antara lain :

1. Prosentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga mencapai 100%
 2. Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk mencapai 100% Hal ini disebabkan karena banyak penduduk yang sudah memiliki KTP-el Denpasar berpindah domisili ke Daerah lain, dan begitu sebaliknya, banyak penduduk Daerah lain yang pindah ke Wilayah Kota Denpasar, mereka belum melakukan perekaman data ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan membuat identitas sesuai dengan alamat yang di Denpasar, serta menurunnya antusias masyarakat untuk melakukan perekaman KTP-el karena keterbatasan blangko KTP-el sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi pencapaian target perekaman KTP-el di Kota Denpasar.
 3. Prosentase kepemilikan Akta Kelahiran mencapai 111%
 4. Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi Akta Kematian mencapai 143%
- Sedangkan kalau ditinjau dari program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 daya serap anggaran mencapai 91%.

Namun demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugasnya untuk langkah antisipatif dan strategi untuk tahun yang akan datang berupaya meningkatkan, mengoptimalkan kinerja untuk memberikan pelayanan prima pada masyarakat dengan segala sarana dan prasarana yang ada sebagai komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai Visi dan Misi Dinas serta Motto Pelayanan yaitu "SEWAKA DHARMA".



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) yang merupakan Laporan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2018, ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekian dan terima kasih.

Denpasar, 14 Pebruari 2019
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Denpasar,



Ir. Anak Agung Istri Agung MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19610707 198703 2 010



PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Majapahit Telp . 428597 Denpasar
Website : kependudukan.denpasarkota.go.id
Email : kependudukan@denpasarkota.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR

Untuk mengukur pencapaian atas tujuan dan sasaran strategis tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah **Indeks Kepuasan Masyarakat**.

Menyetujui :

Wali Kota Denpasar



Harmawijaya Mantra, SE. M.Si.

Denpasar, 14 Pebruari 2019

Pt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Denpasar



Ir. Anas Agung Istri Agung, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19610707 198703 2 010



PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Majapahit Telp . 428597 Denpasar
Website : kependudukan.denpasarkota.go.id
Email : kependudukan@denpasarkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Anak Agung Istri Agung, MM
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
Selanjutnya di sebut pihak pertama.

Nama : I.B. Rai Dharmawijaya Mantra, SE, M.Si
Jabatan : Walikota Denpasar
Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

I.B. Rai Dharmawijaya Mantra, SE. M.Si



Denpasar, 14 Pebruari 2019

Pihak Pertama

Ir. Anak Agung Istri Agung, MM

Pembina Tingkat I
NIP. 19610707 198703 2 010



LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2018

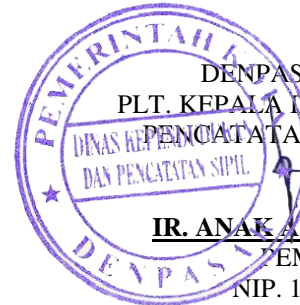
No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan di seluruh Kota Denpasar yang tertib dan terpadu	1. Prosentase keluarga yang memiliki KK 2. Prosentase penduduk yang memiliki KTP 3. Prosentase penduduk yang meninggal yang dilengkapi dengan akta kematian 4. Prosentase kepemilikan akta kelahiran	100% 100% 90% 70%
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	1. Prosentase hasil survey kepuasan masyarakat	81%

Program	Anggaran
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
a. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 4.472.262.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
a. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	RP. 1.233.779.700
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 96.000.000
4. Program Penataan Administrasi Kependudukan	
a. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Rp. 27.750.000
b. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp. 26.680.000
c. Peningkatan kapasitas aparatur kependudukan dan catatan sipil	Rp. 20.430.000
d. Sosialisasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rp. 17.155.000
e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Rp. 109.525.000
f. Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Rp. 50.000.000
g. Pembuatan penyusunan profil perkembangan kependudukan	Rp. 37.080.000
h. Pelaksanaan E-KTP di Kota Denpasar	Rp. 35.100.000
i. Pengolahan dan pengarsipan data catatan sipil	Rp. 515.650.000
j. Pengembangan sistem administrasi kependudukan (SAK) terpadu	Rp. 1.308.089.000
k. Sertifikasi ISO 9001:2015	Rp. 221.975.000
l. Inovasi pelayanan publik	Rp. 186.870.000



MENYETUJUI :
WALIKOTA DENPASAR

M. RAJUS RAI DHARMAWIJAYA MANTRA, S.E., M.Si.



DENPASAR, 14 FEBRUARI 2019

PLT. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR

IR. ANAK AGUNG ISTRI AGUNG, MM

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19610707 198703 2010

PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan di seluruh Kota Denpasar yang tertib dan terpadu	1. Prosentase keluarga yang memiliki KK 2. Prosentase penduduk yang memiliki KTP-el 3. Prosentase penduduk yang meninggal yang di lengkapi dengan akta kematian 4. Prosentase kepemilikan akta kelahiran	100% 100% 90% 70%
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	1. Prosentase hasil survey kepuasan masyarakat	82%

Program	Anggaran
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 3.585.681.500
a. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 1.443.270.000
a. Kegiatan Peningkatan Sarana dan prasarana Aparat	
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 112.000.000
a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
4. Program Penataan Administrasi Kependudukan	
a. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Rp. 31.386.000
b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Rp. 74.805.000
c. Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Rp. 50.000.000
d. Pembuatan penyusunan profil informasi perkembangan kependudukan	Rp. 35.580.000
e. Pengolahan dan pengarsipan data catatan sipil	Rp. 90.150.000
f. Kegiatan audit survailance ISO	Rp. 76.125.000
g. Pengembangan system administrasi kependudukan (SAK)	Rp. 1.438.898.000



MENYETUJUI :
WALIKOTA DENPASAR

IR. ABAGUS DHARMAWIJAYA MANTRA, S.E., M.Si.



DENPASAR, 14 FEBRUARI 2019
PLT. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR

IR. ANAK AGUNG ISTRIAGUNG, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19610707 198703 2 010

PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR

Tahun Anggaran : 2018

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan di seluruh Kota Denpasar yang tertib dan terpadu	1. Prosentase keluarga yang memiliki KK 2. Prosentase penduduk yang memiliki KTP 3. Prosentase penduduk yang meninggal yang di lengkapi dengan akta kematian 4. Prosentase kepemilikan akta kelahiran	100% 100% 90% 70%	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 111 % 143 %
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	1. Prosentase hasil survey kepuasan masyarakat	81%	86,75 %	102 %

Jumlah Anggaran Tahun 2018 : 8.358.345.700

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2018 : 7.589.930.819



Denpasar, 14 Pebruari 2019

PLT. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA DENAPASAR

IR. ANAK AGUNG ISTRI AGUNG, MM

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19610707 198703 2 010

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KOTA : DENPASAR

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR

TUGAS DAN FUNGSI : MELAKSANAKAN KEWENANGAN OTONOMI DAERAH KOTA DENPASAR DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

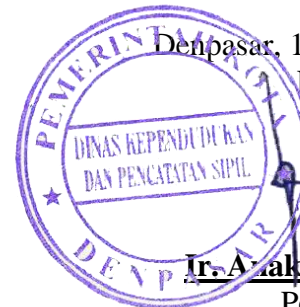
No.	SASARAN RPJM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan di seluruh Kota Denpasar yang tertib dan terpadu	1. Prosentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga 2. Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk 3. Prosentase kepemilikan Akta Kelahiran 4. Prosentase penduduk meninggal yang di lengkapi Akta Kematian	1. Kepala Bidang Pendaftaran penduduk 2. Kepala Bidang Pencatatan Sipil	Buku Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	$\frac{\text{Jumlah KK yang diterbitkan pada tahun (X)}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga dalam satu wilayah pada tahun (X)}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah KTP Elektronik yang diterbitkan pada tahun (X)}}{\text{Jumlah Wajib KTP Elektronik pada tahun (X)}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan (X)}}{\text{Jumlah Kelahiran yang terjadi}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jml kutipan akta kematian yg telah diterbitkan sampai dgn th (X)}}{\text{Jumlah Kematian yang terjadi sampai dengan tahun (X)}} \times 100\%$

2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Prosentase Hasil Survey kepuasan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris 2. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk 3. Kepala Bidang Pencatatan Sipil 4. Kepala Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan 5. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 	Laporan SKM	<p>Total nilai rata-rata tertimbang x 25</p> <ul style="list-style-type: none"> • Total nilai rata-rata tertimbang didapat dari jumlah nilai rata-rata tertimbang per unsur • Jumlah nilai rata-rata tertimbang per unsur didapat dari total nilai unsur di bagi jumlah responden
----	----------------------------------	---	---	-------------	---



Pihak Kedua,

B. K. Dharmawijaya Mantra, SE. M.Si



Denpasar, 14 Pebruari 2019

Pihak Pertama,

Ir. Anak Agung Istri Agung, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19610707 198703 2 010

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
 Tahun : 2019

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan di seluruh Kota Denpasar yang tertib dan terpadu	1. Prosentase keluarga yang memiliki KK 2. Prosentase penduduk yang memiliki KTP 3. Prosentase penduduk yang meninggal yang di lengkapi dengan akta kematian 4. Prosentase kepemilikan akta kelahiran	100% 100% 90% 70%
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	1. Prosentase hasil survey kepuasan masyarakat	82%



Denpasar, 14 Pebruari 2019
 PLT. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KOTA DENAPASAR

IR. ANAK AGUNG ISTRI AGUNG, MM
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19610707 198703 2010